

LAPORAN AKHIR

**PENELITIAN PROGRAM KOMPETITIF NASIONAL DAN PENUGASAN
DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022
TAHAP PERTAMA**

**Apa yang Mendorong Kepercayaan dan Praktik Evidence-based Policy (EBP) ? Suatu
Studi di Provinsi Sumatera Selatan**



Dr. Andries Lionardo, M.Si

NIDN. 0001057901.

Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si

NIDN. 0005118401.

Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si

NIDN. 0007109302

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model yang berisi ekologi administrasi seperti apa yang mendorong pembuat kebijakan memperhatikan bukti ilmiah untuk membuat kebijakan yang berbasis bukti. Penelitian ini hadir di tengah kebutuhan untuk mempertemukan bukti ilmiah dengan pembuat kebijakan publik untuk menghasilkan kebijakan publik yang berhasil demi kepentingan publik; mengidentifikasi pendorong dan penghalang secara kuantitatif. Tidak diragukan lagi, dukungan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan mampu mendorong pencapaian tujuan kebijakan menjadi lebih terarah dan meminimalisasi risiko kegagalan kebijakan. Sayangnya dalam praktik dari evidence-based policy (EBP) bukanlah perkara yang mudah. Sekumpulan literatur telah menemukan ada kendala dari individual, institusional, lingkungan dan dari bukti ilmiah itu sendiri. Kumpulan literatur tersebut meninggalkan pertanyaan “apa yang mendorong seorang individu untuk percaya dan mengimplementasikan EBP. Mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religious-science compatibility beliefs, trust in scientific institutions, scientific knowledge, trust in science and scientist terhadap EBP beliefs dan EBP implementation. Selain itu kami mengambil variabel public service motivation (PSM) sebagai variabel moderator. Terdapat 10 hipotesis yang dirumuskan dan akan diuji dengan menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square. Sebanyak 499 fungsional analisis kebijakan dan perencanaan di diminta mengisi kuisioner yang terdiri dari 87 pernyataan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan level TKT 2 menuju TKT 3. Luaran dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang nantinya akan dikirimkan ke Heliyon (Q1) untuk tahun pertama dan Public Policy and Administration (Q3) serta menghasilkan luaran tambahan berupa Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh UNSRI Press (Tahun pertama) dan satu Book Chapter yang diterbitkan di Research in Public Policy Analysis and Management (Emerald Publishing), untuk tahun kedua.

Kata kunci maksimal 5 kata

evidence-based policy; EBP; pembuat kebijakan; science; public service motivation

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Atensi tentang penggunaan bukti ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan telah mendapatkan perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kemunculan konsep *evidence-based policy* (EBP) [1]–[3]. EBP menyoroti pemecahan masalah publik melalui cara-cara ilmiah yang sistematis, diselesaikan berdasarkan berbagai bukti seperti penelitian dan evaluasi kebijakan [4]–[6]. EBP melibatkan aplikasi instrumental yang dihasilkan dari suatu penelitian tetapi juga aplikasi tidak langsung yang membentuk bagaimana masalah dibingkai dan dipahami secara komprehensif [7], [8]. EBP menjanjikan kebijakan publik yang lebih terarah dan juga pengurangan risiko kegagalan serta orientasi pada kepentingan publik yang lebih besar [9]–[11].

EBP membawa konsekuensi pada peningkatan tekanan bagi lembaga *think-tank* untuk menghasilkan dan menyediakan bukti ilmiah yang relevan dengan proses pembuatan kebijakan

[12]–[14]. Di sisi lain, penelitian terkadang dibuat tidak hanya untuk kebutuhan praktis semata, namun juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan [15], [16]. Hal ini diperumit dengan orientasi para akademisi dan peneliti saat ini; menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah [17], [18]. Meskipun belum dilakukan secara masif, pemerintah saat ini telah mengupayakan arah dan orientasi penelitian berbasis utilitas untuk mendukung pembuatan kebijakan, menghasilkan naskah kebijakan sebagai bahan pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga pembuatan *policy brief* untuk mengukur dampak dari suatu penelitian akademik [19].

Praktik EBP telah menghasilkan sejumlah literatur yang berokus pada faktor pendorong dan juga penghambat EBP baik dari sisi individu, institusi, lingkungan ataupun dari masalah bukti ilmiah itu sendiri [20]–[23]. Sejumlah penelitian juga telah mengeksplorasi EBP secara kualitatif dan menghasilkan temuan yang beragam seperti alasan keengganan penggunaan EBP; upaya-upaya untuk mendorong EBP dan juga tantangan dari penggunaan EBP dalam mendorong kebijakan publik yang lebih baik [24]–[26]. Sementara itu, penelitian yang menguji EBP secara kuantitatif masih terbatas. Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi hal ini; secara kuantitatif deskriptif menguji persepsi terhadap EBP, kendala dan pendorong EBP juga sumber-sumber bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan [27], [28]. Sementara itu, studi yang menguji tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan belum banyak dilakukan.

Mengisi kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *religious-science compatibility beliefs, trust in scientific institutions, scientific knowledge, trust in science* and scientist terhadap EBP *beliefs* dan EBP *implementation*. Selain itu kami mengambil variabel *public service motivation* (PSM) sebagai variabel moderator dengan argument bahwa orientasi pada pelayanan publik akan meningkatkan EBP baik kepercayaan maupun implementasinya. PSM merupakan atribut yang dimiliki oleh pegawai yang mampu menjelaskan mengapa seorang individu memiliki keinginan untuk melayani publik dan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka untuk memperjuangkan kepentingan publik secara umum [29].

Penelitian ini berkontribusi untuk dua hal, pertama adalah secara akademik, mengisi ruang yang kosong untuk menjelaskan mengapa seorang pembuat kebijakan percaya dan melaksanakan EBP dengan mengambil PSM sebagai variabel yang memoderasi pengaruh dan hubungan antar variabel laten. Kedua, secara praktis, pemangku kepentingan terkait, dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini nantinya, dapat mengembangkan atribut-atribut tertentu untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan agar kebijakan yang mereka buat mempertimbangkan bukti ilmiah untuk hasil yang lebih baik dan akurat.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Penelitian Evidence Based Policy

Penggunaan bukti ilmiah dalam kebijakan di mulai dari disiplin ilmu kedokteran dan menyebar ke berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan sosial, pariwisata, olahraga, pembangunan infrastruktur [30]–[32]. Asumsi yang dibangun adalah bahwa tindakan kebijakan dapat didasarkan pada akumulasi fakta untuk mengendalikan ketidakpastian dan sains memiliki kekuatan untuk memberikan fakta yang tidak memihak [25], [33]. Saat ini EBP telah digunakan

secara besar-besaran dan dilaksanakan dalam berbagai macam kebijakan, program dan kegiatan [34]. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi baik *ex-ante* maupun penilaian dampak kebijakan [27]. Di sinilah bukti ilmiah dipanggil untuk menginformasikan dan memformulasikan ulang kebijakan. Ide ini tidak terlepas dari kritik. EBP dianggap mengabaikan hubungan kekuasaan yang terjadi dalam proses pengambilan suatu keputusan karena fakta-fakta yang diperjuangkan secara intensif dan kompleks dalam pengambilan keputusan merupakan perjuangan panjang untuk otoritas politik dan epistemic [25], [35].

Sejumlah literatur telah secara kualitatif memprediksi mengapa seorang individu atau institusi mempraktikkan EBP. Goor et al [36] memetakan determinan penggunaan EBP dalam pembuatan kebijakan kesehatan berbasis bukti di 6 Negara di European Union dan menemukan bahwa praktik EBP didorong oleh dukungan administrasi, dukungan media dalam penggunaan bukti ilmiah, tersedianya riset yang relevan, dan kooperasi antar sektor serta hubungan pembuat kebijakan dengan peneliti. Shahwan et al. [37] (2021) menguji faktor demografis, sosial dan ekonomi yang mendorong pembuat kebijakan untuk mempraktikkan EBP, dan menemukan bahwa kepercayaan EBP dipengaruhi oleh asal universitas (dalam dan luar negeri), sementara itu, implementasi EBP dipengaruhi oleh lama berkerja dan jenis pekerjaan (manajerial dan staf), dan juga asal universitas (dalam dan luar negeri). Kekurangan penelitian inilah yang kemudian mendorong lahirnya penelitian ini, terutama untuk mencari tahu mengapa seorang individu pembuat kebijakan percaya pada EBP dan mempraktikkannya.

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Gagasan bahwa agama dan sains tidak berkeseuaian telah beradar luas terutama dinegara negara barat selama berabad-abad [38]–[40]. Ini diperkuat dengan studi yang menemukan bahwa ketidakpercayaan pada sains diprediksi oleh religiusitas. Namun studi, studi tersebut dilakukan di negara-negara yang didominasi stereotipe individu terhadap agama. Ada sejumlah penelitian yang merekomendasikan untuk menyelenggarakan studi serupa di negara non-barat di mana agama dan sains duduk bersama mempengaruhi kepurusan individu dan dianggap kompatibel [39]. Pengambilan keputusan individu dalam banyak studi telah dieksplorasi dipengaruhi oleh sains dan agama secara simultan maupun parsial [8], [40], [41] dan dalam konteks ini kami mengaplikasikannya pada EBP bahwa kepercayaan pada sains dan agama bahwa keduanya kompatibel dan tidak saling berlawanan akan membuat individu mempercayai EBP. Kemudian, kepercayaan pada sains dan agama dalam pengambilan keputusan juga akan mempengaruhi implementasi EBP. Oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis:

H1: Religious-science compatibility beliefs akan mempengaruhi EBP beliefs

H2: Religious-science compatibility beliefs akan mempengaruhi EBP implementation

Ketersediaan *think-tank* dalam memfasilitasi produksi bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan tidak lah cukup, lembaga tersebut harus memiliki kredibilitas sehingga para pembuat kebijakan percaya bahwa apa yang diproduksi dan disediakan dapat dijadikan rujukan untuk pembuatan keputusan. Ada sejumlah bukti yang berlawanan bahwa EBP dapat dipengaruhi oleh kepercayaan pada institusi sains ketika institusi tersebut dipercaya dan di saat yang sama ketidakpercayaan pada institusi akan membuat EBP tidak diimplementasikan [42]–[44]. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Trust in scientific institutions akan mempengaruhi EBP beliefs

H4: Trust in scientific institutions akan mempengaruhi EBP implementation

Pengetahuan tentang sains juga dianggap mempengaruhi kepercayaan dan implementasi EBP. Seorang individu yang memiliki pengetahuan sains, dibuktikan dari kepemilikan pendidikan tinggi dan lama waktu berkerja akan membuatnya lebih percaya pada EBP dan mengimplementasikan EBP [37]. Oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis:

H5: Science knowledge akan mempengaruhi EBP beliefs

H6: Science knowledge akan mempengaruhi EBP implementation

Sebagaimana bukti ilmiah akan diintegrasikan dalam proses kebijakan untuk menginformasikan masalah dan membuat desain kebijakan yang lebih dianggap berhasil secara ilmiah maka, kepercayaan pada sains dan mereka yang memproduksi sains (ilmuan) menjadi menarik untuk didiskusikan [45]–[47]. Munculnya teori konspirasi dan konsep *pseudoscience* membuat hal ini menjadi semakin menarik karena keduanya mampu mengganggu kepercayaan pada ilmu dan ilmuan itu sendiri [48], [49]. Oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis:

H7: Trust in Science and scientist akan mempengaruhi EBP beliefs

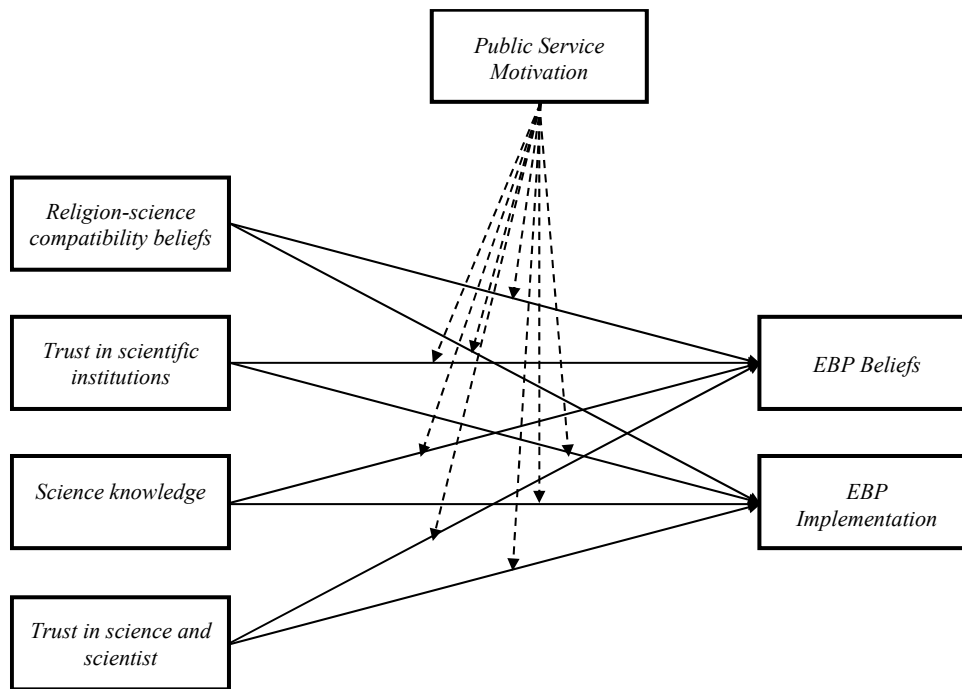
H8: Trust in Science and scientist akan mempengaruhi EBP implementation

PSM merupakan suatu konstruksi pluralistik untuk memahami motivasi individu untuk melayani kepentingan masyarakat dan untuk menjelaskan perilaku individu dalam organisasi publik seperti kinerja dan kepuasan kerja [29], [50]. PSM merupakan bentuk motivasi individu yang mendorong mereka mengesampingkan egonya dan kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan publik [29], [50], [51]. EBP relevan dengan PSM karena dalam proses pembuatan kebijakan apabila individu memiliki PSM yang tinggi mereka akan digerakkan pada kepentingan publik dan nasib publik yang berada di tangan mereka. Lebih lanjut, ketika hal tersebut terjadi ideologi dan kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan publik akan disingkirkan karena kebijakan yang dibuat haruslah sesuai dengan kepentingan masyarakat yang seharusnya berkesesuaian dengan bukti ilmiah yang disajikan [52]–[54]. Oleh karena itu, kami berargumen bahwa PSM akan memoderasi dan meningkatkan kepercayaan dan implementasi EBP dan oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis:

H9: Pengaruh Religious-science compatibility beliefs, Trust in scientific institutions, Science knowledge, Trust in Science and scientist terhadap EBP beliefs akan dimoderatori oleh public service motivation

H10: Pengaruh Religious-science compatibility beliefs, Trust in scientific institutions, Science knowledge, Trust in Science and scientist terhadap EBP implementation akan dimoderatori oleh public service motivation

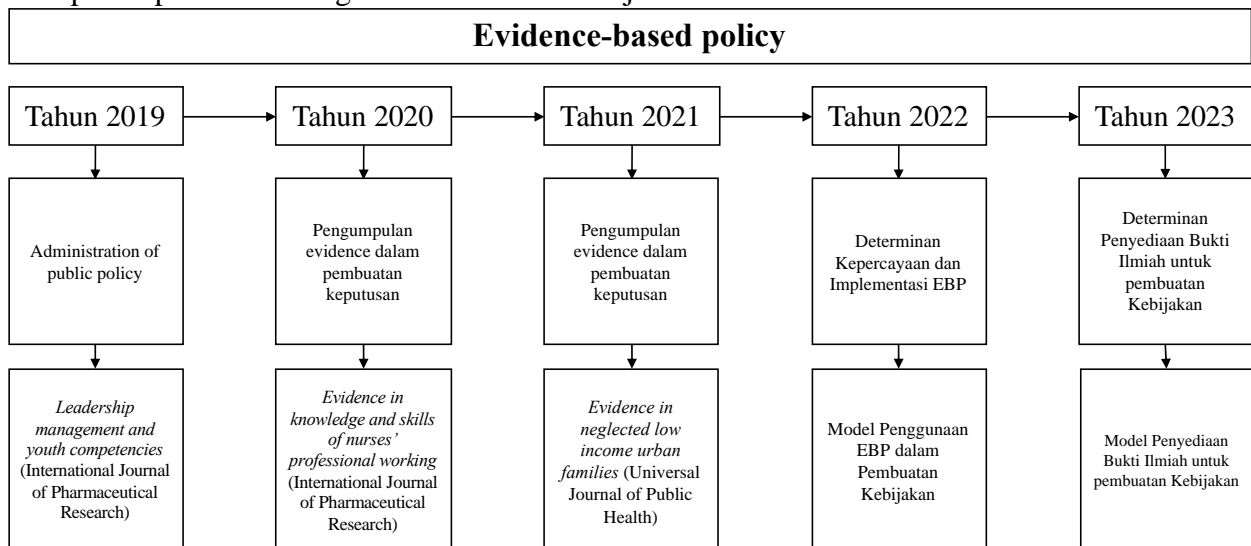
Model penelitian terdapat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Peta Jalan Penelitian

Hal ini disebut dengan evidence-based policy (EBP). Di tahun *pertama* (2022), kami mengeksplorasi EPB dari sisi pengambil kebijakan di indtitusi pemerintah untuk membentuk model perilaku individu seperti apa yang percaya dan mendorong implementasi EPB. Ini bermanfaat secara praktis untuk membangun ekologi administrasi tertentu yang memungkinkan budaya EBP untuk hidup dan berkembang. Sedangkan di tahun *kedua*, 2023, kami akan mengeksplorasi EBP dari sisi penyedia bukti ilmiah yang terdiri dari think tank, institusi pendidikan, NGO dan lain sebagainya tentang pendorong dan penghalang mereka dalam menyediakan bukti-bukti ilmiah untuk menghasilkan kebijakan publik. Penelitian ini merupakan penelitian dengan level TKT 2 menuju TKT 3.



Gambar 2. Peta Jalan Penelitian

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model perilaku individu pembuat kebijakan untuk percaya dan mengimplementasikan EBP dengan menggunakan desain kuantitatif asosiatif. Oleh karena itu Structural Equation Model Partial Least Square (SEM) PLS dianggap relevan untuk diperkerjakan dalam penelitian ini [55].

Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Asumsi bahwa EBP tidak hanya diimplementasikan di kalangan pejabat legislatif namun juga pejabat eksekutif dan sekalipun *street-level bureaucrat* [56] membuat peneliti menetapkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi studi, lebih lanjut kami menetapkan lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Bappeda diambil karena proses perencanaan pembangunan dilakukan di sini sedangkan dinas lain diambil karena mereka telah mengimplementasikan EBP untuk membuat kebijakan berbasis bukti ilmiah di sektor sosial, kesehatan dan pendidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai fungsional baik perencana maupun analisis kebijakan di empat organisasi pemerintahan daerah (OPD) tersebut. Jumlah populasi setiap OPD adalah 103, 99, 64, dan 72 masing-masing secara berurutan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan Rumus Slovin dengan level of confidence 95% dan tingkat error 5%. Dari hasil perhitungan, sampel dalam penelitian ini adalah 499 orang. Untuk memastikan representasi dari masing-masing OPD kami memperkerjakan *stratified random sampling* yang memberikan kesempatan setara pada setiap responden di setiap OPD untuk menjadi berpartisipasi dalam penelitian.

Instrumen Penelitian

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Pernyataan	Sumber	Skala dan Pilihan Jawaban
<i>Religious-science compatibility beliefs.</i>	4	Rios & Aveyard [39]	7
<i>Trust in scientific institutions</i>	3	Achterberg <i>et al</i> [44]	10
<i>Science knowledge</i>	13	Achterberg <i>et al</i> [44]	5
<i>Trust in Science and scientist</i>	21	Nadelson, <i>et al.</i> [57]	5
<i>Public Service Motivation</i>	5	Kim <i>et al.</i> [58] Coursey <i>et al.</i> [85]	5
<i>EBP implementation</i>	18	Shahwan <i>et al.</i> [37].	5
<i>EBP beliefs</i>	16	Shahwan <i>et al.</i> [37].	5

Analisis Data

Untuk analisis data, kami menggunakan SEM-PLS dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Pertama-tama kami melakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuisioner yang kami buat dengan membagikannya kepada 30 orang. Setiap variabel dan pernyataan dikatakan valid apabila nilai cross loading lebih tinggi dari outer loadings dan nilai outer loadings harus lebih besar dari 0.70. Sementara itu untuk reliabilitas nilai cronbach's alpha harus berada di atas 0.70 dan composite reliability di atas 0.60. Kemudian kami membagikan kuisioner kepada seluruh responden dan melakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran demografis, sosial dan ekonomi dari keseluruhan pengisi kuisioner. Kemudian, kami melakukan penghitungan R-Square di mana nilai R-Square >0.67(kuat); >0.33(moderat); dan >0.19 (lemah) serta menggunakan nilai p dimana apabila $p < 0.05$ maka terjadi hubungan yang signifikan sedangkan apabila > 0.05 maka tidak signifikan [60]. Hubungan positif dan negatif dilihat dari nilai plus atau minus [60].

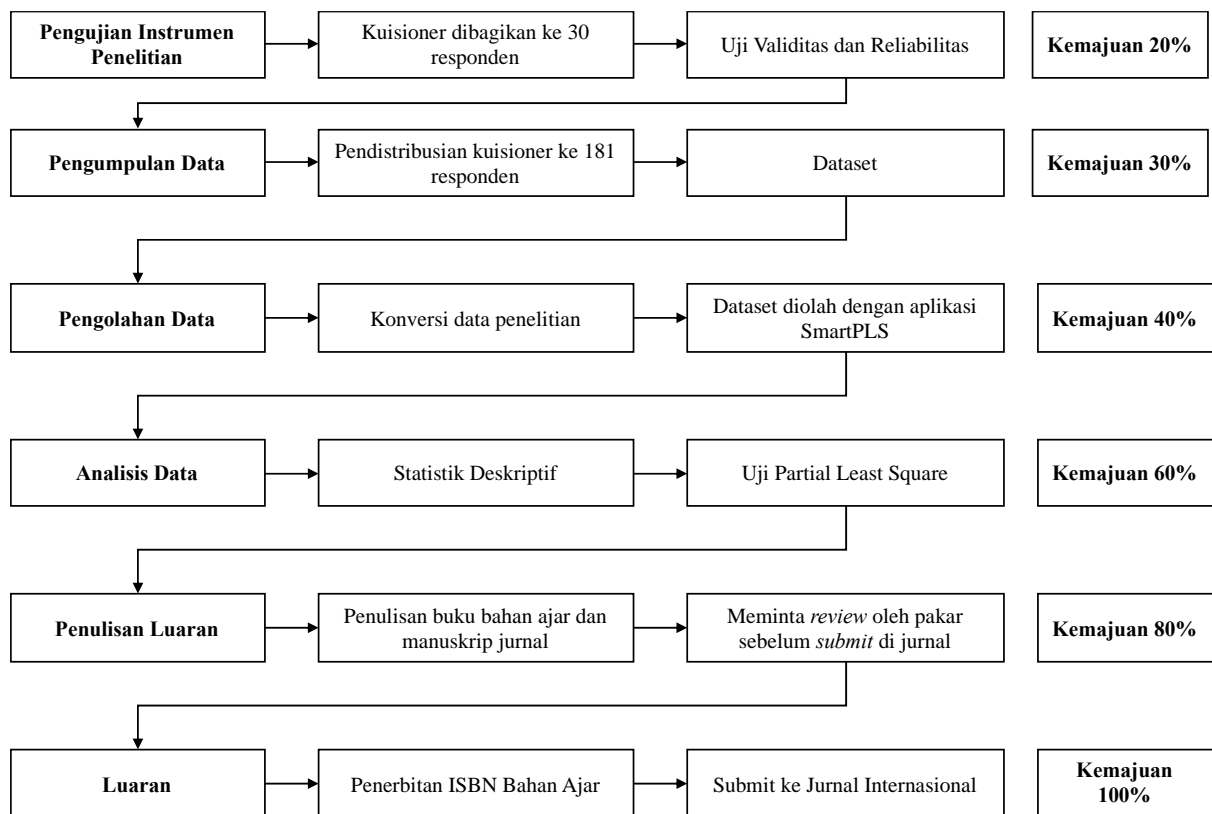
Luaran penelitian

Penelitian ini menghasilkan luaran wajib dan tambahan untuk setiap tahunnya. Luaran dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang nantinya akan dikirimkan ke International Journal of Public Law and Policy (Q3) untuk tahun pertama dan Public Policy and Administration (Q3) serta menghasilkan luaran tambahan berupa Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh UNSRI Press (Tahun pertama) dan satu Book Chapter yang diterbitkan di Research in Public Policy Analysis and Management (Emerald Publishing), untuk tahun kedua.

Pembagian Tugas

Ketua peneliti bertugas untuk menyusun proposal bagian latar belakang dan tinjauan literatur, merumuskan hipotesis, dan menulis manuskrip jurnal internasional. Anggota peneliti I bertugas untuk menyusun metodologi penelitian, melakukan analisis data dan memvisualisasikan penelitian. Sementara itu, Anggota peneliti II merupakan administrator proyek, membuat kuisioner, bertanggung jawab dalam pengumpulan data dan menulis luaran tambahan.

Alur Penelitian dan Persentase Keberhasilan



Gambar 3. Alur Penelitian.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Perbaikan Proposal	√												
2	Penyusunan Kuisisioner	√												
3	Uji Validitas dan Reliabilitas kepada 30 responden		√											
4	Perbaikan Kuisisioner		√											
5	Distribusi Kuisisioner dan Pembuatan Dataset		√											
8	Pengolahan Data: Statistik Deskriptif			√										
9	Pengolahan Data: Uji Partial Least Square			√	√									
10	Analisis Data				√	√								
11	Pembuatan Manuskrip					√	√							
12	Pembuatan Bahan Ajar					√	√	√						
13	Pengurusan ISBN							√	√	√				
14	Pengiriman Artikel Jurnal											√		√

Tahun ke-2

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perbaikan Proposal	√											
2	Penyusunan Kuisisioner	√											
3	Uji Validitas dan Reliabilitas kepada 30 responden		√										
4	Perbaikan Kuisisioner		√										
5	Distribusi Kuisisioner dan Pembuatan Dataset		√										
8	Pengolahan Data: Statistik Deskriptif			√									
9	Pengolahan Data: Uji Partial Least Square			√	√								
10	Analisis Data				√	√							
11	Pembuatan Manuskrip					√	√	√					
12	Pembuatan Bahan Ajar					√	√	√	√	√	√		
13	Pengurusan ISBN											√	
14	Pengiriman Artikel Jurnal												√

Tahun ke-3

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkasan mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

Demografi Responden

Terlihat pada tabel 1 bahwa terdapat 499 responden dengan banyaknya perempuan 261 (52,30%) dan laki-laki 238 (47,70%). Rentang kelahiran dibagi atas generasi-generasi yang pertama yaitu, tidak terdapatnya responden dengan rentang tahun kelahiran 1946-1964 atau biasa disebut Boomers (0%), kedua, rentang tahun kelahiran 1965-1980 Generasi X dengan jumlah responden 182 (36,47%), ketiga, millenials dengan rentang tahun kelahiran 1981-1996 yang berjumlah 226 responden (45,29%) menempati posisi tertinggi, terakhir generasi Z dengan tahun kelahiran 1997-2012 banyaknya responden yaitu 91 (18,24%).

Dari jenis kelamin serta generasi para responden, berlanjut pada kelompok jabatan responden yang dibagi menjadi 6 yaitu, pertama, jabatan administrator berjumlah 91(18,24%) responden. Kedua, jabatan pengawas yaitu sebanyak 23 (4,61%). Ketiga, jabatan pelaksana sebanyak 91 (16,24%). Keempat, jabatan fungsional keahlian dengan jumlah responden tertinggi yaitu sebesar 157 (31,46%). Kelima, jabatan

menempati posisi terendah yang menjadi responden yaitu jabatan fungsional keterampilan hanya 12 (2,40%) yang menjadi responden. Terakhir, jabatan lain-lain sebesar 125 (25,05%) responden.

Tabel 1. Demografi Responden

Jenis kelamin		
Laki-laki	238	47.70%
Perempuan	261	52.30%
Generasi		
1964-1964 (Boomers)	0	0.00%
1965-1980 (Generation X)	182	36.47%
1981-1996 (Millennials)	226	45.29%
1977-2012 (Generation Z)	91	18.24%
Kelompok jabatan		
Jabatan administrator	91	18.24%
Jabatan pengawas	23	4.61%
Jabatan pelaksana	91	18.24%
Jabatan fungsional keahlian	157	31.46%
Jabatan fungsional keterampilan	12	2.40%
Lain-lain	125	25.05%
Status kepegawaian		
PNS	441	88.38%
Kontrak	36	7.21%
Lain-lain	22	4.41%
Lama berkerja		
Di bawah 5 tahun	68	13.63%
5-10 tahun	102	20.44%
11-15 tahun	147	29.46%
16-20 tahun	68	13.63%
> 20 tahun	114	22.85%
Lokasi tempat berkerja		
Kementerian/Lembaga	57	11.42%
Pemerintahan Provinsi	193	38.68%
Pemerintah Kabupaten/Kota	249	49.90%
Takehome pay		
1 - 3 juta	68	13.63%
3,1 - 5 juta	181	36.27%
5,1 - 7 juta	125	25.05%
7,1 - 9 juta	68	13.63%

> 12 juta	57	11.42%
-----------	----	--------

Untuk status kepegawaian responden dibagi menjadi 3 yaitu, PNS di posisi tertinggi yaitu sebanyak 441 (88,38%). Kontrak hanya sebesar 36 (7,21%) responden. Terakhir, staus kepegawaian lainnya yaitu 22 (4,41%) responden. Untuk lamanya bekerja responden dibagi menjadi 5 pembagian. Pertama, di bawah 5 tahun dengan jumlah responden 68 (13,63%). Kedua, 5-10 tahun sebanyak 102 (20,44%). Ketiga, 11-15 tahun dengan jumlah 147 (29,46%) responden. Keempat, 16-20 tahun yaitu sebesar 68 (13,63%) responden yang sama dengan responden yang bekerja di bawah 5 tahun. Kelima, pekerja dengan lamanya bekerja lebih dari 20 tahun sebanyak 114 (22,85%) responden.

Selanjutnya, lokasi tempat bekerja yang dibagi menjadi 3 yaitu kementerian/lembaga dengan jumlah responden 57 (11,42%). Untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berturut-turut yaitu 193 (38,68%) dan 249 (49,90%) responden. Tempat bekerja ini menentukan *takehome pay* seorang pegawai. Pertama, 1-3 juta sebesar 68 (13,63%) responden. Kedua, 3,1-5 juta dengna jumlah responden 181 (36,27%). Ketiga, 5,1-7 juta yaitu 125 (25,05%) responden. *Takehome pay* sebesar 7,1 - 9 juta serta 12 juta ke atas dengan jumlah responden yaitu 68 (13,63%) dan 57 (11,42%).

Penggunaan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan

Tabel 2 berisi pendapat terkait bukti ilmiah yang biasa digunakan yang dibagi menjadi 7 jenis. Pertama, Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja sebanyak 272 (54,51%) responden menyatakan benar adanya. Selanjutnya responden kami menggunakan bukti ilmiah yang berasal dari membaca dari internet sebanyak 261 (52,30%) responden, menduduki posisi kedua tertinggi bukti ilmiah yang biasa digunakan. Selanjutnya adalah Instansi pemerintah di luar instansi tempat saya berkerja namun masih dalam wilayah kerja yang sama (sama-sama instansi di bawah kementerian/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/pemerintah kota) sebanyak 227 (45,49%) responden. Bukti lain yang jarang digunakan adalah Instansi pemerintah di luar wilayah kerja saya (misal Badan Pusat Statistik) sebanyak 193 (38,68%) responden; Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh mitra yang direktrut oleh instansi tempat saya berkerja sebesar 147 (29,46%) responden; Non-government organization seperti OECD, World Bank, IMF, ADB dan lain sebagainya sebanyak 68 (13,63%) responden; dan Program dan kegiatan tahun lalu. Ataupun program dan kegiatan sejenis yang sudah dikerjakan di daerah lain hanya sebesar 12 (2,40%) responden.

Tabel 2. Jenis bukti ilmiah yang digunakan

Bukti ilmiah yang biasa digunakan	Frekuensi	Persentase
Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh instansi tempat saya berkerja	272	54.51%
Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh mitra yang direktrut oleh instansi tempat saya berkerja	147	29.46%
Instansi pemerintah di luar instansi tempat saya berkerja namun masih dalam wilayah kerja yang sama (sama-sama instansi di bawah kementerian/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/pemerintah kota)	227	45.49%
Instansi pemerintah di luar wilayah kerja saya (misal Badan Pusat Statistik)	193	38.68%
Non-government organization seperti OECD, World Bank, IMF, ADB dan lain sebagainya	68	13.63%
Membaca dari internet	261	52.30%
Program dan kegiatan tahun lalu. Ataupun program dan kegiatan sejenis yang sudah dikerjakan di daerah lain	12	2.40%
Jenis bukti Ilmiah		
Riset - Studi kualitatif	250	50.10%
Riset - Before and after studies (studi eskperimental)	68	13.63%
Riset - Observasi, pengalaman dan laporan dari	193	38.68%

evaluasi kebijakan		
Riset - Analisis data time series	80	16.03%
Riset - Penelitian kohort	0	0.00%
Pengetahuan & Informasi - Hasil proses konsultasi dengan pemangku kepentingan	204	40.88%
Pengetahuan & Informasi - Dokumen atau laporan yang dipublikasikan oleh instansi yang kredibel	215	43.09%
Pengetahuan & Informasi - Media sosial	182	36.47%
Pengetahuan & Informasi - Berita	170	34.07%
Pakar - Pakar yang secara khusus diminta untuk memberikan pendapat di instansi saya berkerja	113	22.65%
Pakar - Opini dan pandangan pakar yang disampaikan di publik	102	20.44%

Selain bukti ilmiah yang biasa digunakan, responden juga memberikan pernyataan penggunaan jenis bukti ilmiah yang digunakan. Jenis bukti ilmiah ini berkategori menjadi 3 kategori beserta turunannya sebagaimana terdapat dalam Tabel 2. Kebanyakan responden kami menggunakan bukti ilmiah dengan jenis riset yaitu studi kualitatif berada di posisi teratas yaitu sebanyak 250 (50,10%) responden. Dari jenis pengetahuan dan informasi, responden dalam penelitian ini lebih sering menggunakan pengetahuan & Informasi berupa dokumen atau laporan yang dipublikasikan oleh instansi yang kredibel sebanyak 215 (43,09%) responden. Pakar berupa pakar yang secara khusus diminta untuk memberikan pendapat di instansi saya berkerja sebanyak 113 (22,65%) responden dan pakar berupa opini dan pandangan pakar yang disampaikan di publik sebesar 102 (20,44%) responden.

Validitas dan reliabilitas

Tabel 1 menunjukkan nilai *loadings* dari setiap indikator. Berdasarkan hasil perhitungan setiap indikator memiliki nilai >0.70 sehingga semua indikator tersebut dapat dipertahankan. Setiap indikator yang memiliki nilai *standard loadings* diatas 0.70 menunjukkan bahwa variabel laten dapat menjelaskan variansi setiap indikator sebesar 50% [55]. Dengan memperhatikan nilai *loadings* dari setiap indikator penulis menyimpulkan bahwa setiap indikator dalam penelitian memenuhi kriteria.

Tabel 3. Analisis *loadings*, α , CR, dan AVE

	Items	Loadings	α	CR	AVE
Religious-science compatibility belief	RSCB1	0.758	0.847	0.838	0.807
	RSCB2	0.898			
	RSCB3	0.760			
	RSCB4	0.796			
Science Knowledge	SK1	0.742	0.841	0.903	0.708
	SK2	0.859			
	SK3	0.868			
	SK4	0.756			
	SK5	0.812			
	SK6	0.729			
	SK7	0.848			
	SK8	0.725			
	SK9	0.749			
	SK10	0.845			
	SK11	0.835			
	SK12	0.881			
	TISI1	0.852	0.913	0.818	0.697

Trust in scientific institution	TISI2	0.715			
	TISI3	0.854			
	TISI4	0.712			
Trust in science and scientist	TINSS1	0.734	0.853	0.924	0.774
	TINSS2	0.814			
	TINSS3	0.782			
	TINSS4	0.756			
	TINSS5	8.008			
	TINSS6	0.878			
	TINSS7	0.812			
	TINSS8	0.720			
	TINSS9	0.809			
	TINSS10	0.852			
	TINSS11	0.705			
	TINSS12	0.817			
	TINSS13	0.757			
	TINSS14	0.826			
	TINSS15	0.805			
	TINSS16	0.784			
	TINSS17	0.746			
	TINSS18	0.703			
	TINSS19	0.758			
	TINSS20	0.703			
	TINSS21	0.803			
Public service motivation	PSM1	0.859	0.935	0.834	0.725
	PSM2	0.711			
	PSM3	0.800			
	PSM4	0.789			
	PSM5	0.853			
	PSM6	0.768			
	PSM7	0.854			
	PSM8	0.706			
	PSM9	0.894			
	PSM10	0.748			
	PSM11	0.841			
	PSM12	0.728			
	PSM13	0.878			
	PSM14	0.769			
	PSM15	0.750			
	PSM16	0.712			
	PSM17	0.786			
	PSM18	0.701			
	PSM19	0.892			
	PSM20	0.885			
	PSM21	0.812			

	PSM22	0.886			
Evidence-based policy beliefs	EBPB1	0.701	0.853	0.901	0.831
	EBPB2	0.769			
	EBPB3	0.808			
	EBPB4	0.705			
	EBPB5	0.848			
	EBPB6	0.708			
	EBPB7	0.796			
	EBPB8	0.769			
	EBPB9	0.718			
	EBPB10	0.703			
	EBPB11	0.800			
	EBPB12	0.738			
	EBPB13	0.751			
	EBPB14	0.827			
	EBPB15	0.725			
	EBPB16	0.726			
Evidence-based policy Practices	EBPP1	0.748	0.899	0.914	0.798
	EBPP2	0.843			
	EBPP3	0.707			
	EBPP4	0.763			
	EBPP5	0.800			
	EBPP6	0.721			
	EBPP7	0.850			
	EBPP8	0.787			
	EBPP9	0.742			
	EBPP10	0.737			
	EBPP11	0.816			
	EBPP12	0.744			
	EBPP13	0.736			
	EBPP14	0.829			
	EBPP15	0.730			
	EBPP16	0.741			

Tabel 3 juga menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk masing-masing variabel. Jogiyanto & Abdillah (2015) menyatakan bahwa suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari *composite reliability* >0.70 dan nilai pada *cronbach's alpha* > 0.60 [55]. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk masing-masing variabel diatas 0.60 dan nilai *composite reliability* diatas 0.70 sehingga semua item dalam setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel atau memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas minimum yang telah diisyaratkan. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel dalam penelitian memiliki nilai AVE >0.50, nilai AVE yang baik diisyaratkan memiliki nilai diatas 0.50 [61]. Penelitian ini menunjukkan nilai AVE untuk RSCB 0.807, SK 0.708, TISI 0.697, TINSS 0.774, PSM 0.725, EBPB 0.831, dan EBPP 0.798. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan dalam pengujian *convergent validity*.

Fornell-Larcker Criterion

Tabel 4 menunjukkan bahwa proses perhitungan *Fornell-Larcker Criterion* dilakukan dengan membandingkan akar AVE setiap konstruk terhadap korelasi antar satu konstruk lainnya [61]. Jika hasil

Fornell Larcker Criterion menunjukkan nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar satu konstruk terhadap konstruk lainnya, maka discriminant validity dinyatakan baik. Nilai pada konstruk EBPB 0.763 pada tabel diatas lebih besar daripada korelasinya terhadap konstruk lainnya, yaitu EBPP terhadap EBPP sebesar 0.430, EBPP terhadap PSM sebesar 0.580, EBPP terhadap RSCB sebesar 0.334, EBPP terhadap SK sebesar 0.324, EBPP terhadap TISI sebesar 0.349, dan EBPP terhadap TISS sebesar 0.453.

Tabel 4. *Fornell-Larcker Criterion*

	EBPB	EBPP	PSM	RSCB	SK	TISI	TISS
EBPB	0.763						
EBPP	0.430	0.831					
PSM	0.580	0.576	0.754				
RSCB	0.334	0.392	0.392	0.854			
SK	0.324	0.388	0.324	0.210	0.729		
TISI	0.349	0.409	0.410	0.225	0.157	0.845	
TISS	0.453	0.515	0.519	0.274	0.233	0.285	0.873

Begitu juga nilai konstruk lainnya yaitu akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar satu konstruk terhadap konstruk lainnya, untuk EBPP 0.831, PSM 0.754, RSCB 0.854, SK 0.729, TISI 0.845, dan konstruk TISS 0.873 karena semua konstruk laten nilai AVE > Korelasinya dengan konstruk lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa semua konstruk pada penelitian ini memenuhi kriteria dengan memperhatikan kriteria tersebut [62].

Analisis model sruktural

Berdasarkan data pada tabel 5 diketahui bahwa *Religious-science compatibility belief* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.088$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* dengan nilai t-statistik $2.683 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pada *Religious-science compatibility belief* terhadap *Evidence-based policy belief* dapat diterima.

Tabel 5. Results of the structural model

Hipot esis	Arah hubungan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
1	RSCB -> EBPB	0.088	0.093	0.031	2.683	0.000
2	RSCB -> EBPP	0.092	0.085	0.038	2.505	0.000
3	SK -> EBPB	0.087	0.092	0.037	3.821	0.000
4	SK -> EBPP	0.092	0.098	0.029	3.238	0.001
5	TISI -> EBPB	0.084	0.082	0.042	1.976	0.049
6	TISI -> EBPP	0.108	0.104	0.029	3.725	0.000
7	TISS -> EBPB	0.078	0.102	0.036	2.703	0.000
8	TISS -> EBPP	0.070	0.174	0.033	2.105	0.036
9	RSCB*PSM -> EBPP	0.207	0.193	0.065	3.494	0.000
10	RSCB*PSM -> EBPP	0.201	0.204	0.067	3.309	0.000
11	SK*PSM -> EBPP	0.216	0.191	0.066	3.333	0.000
12	SK*PSM -> EBPP	0.201	0.216	0.061	3.323	0.000
13	TISI*PSM -> EBPP	0.202	0.190	0.060	3.381	0.001
14	TISI*PSM -> EBPP	0.217	0.205	0.059	3.665	0.000
15	TISS*PSM -> EBPP	0.239	0.232	0.058	3.084	0.000
16	TISS*PSM -> EBPP	0.244	0.240	0.059	3.656	0.000

Religious-science compatibility belief memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.092$) terhadap *Evidence-based policy Practices* dengan t-statistik $2.505 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Religious-science compatibility belief* terhadap *Evidence-based policy Practices* dapat diterima. *Trust in scientific institution* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.084$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* dengan nilai t-statistik $1.976 > 1.96$ dan nilai p-value $0.049 < 0.05$. Oleh karena itu, H3 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Trust in scientific institution* terhadap *Evidence-based policy beliefs* dapat diterima. *Trust in scientific institution* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.108$) terhadap *Evidence-based policy Practices* dengan nilai t-statistik $3.725 > 1.96$ dengan nilai p-value $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Trust in scientific institution* terhadap *Evidence-based policy Practices* dapat diterima.

Science Knowledge memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.087$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* dengan nilai t-statistik $3.821 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu, H5 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Science Knowledge* terhadap *Evidence-based policy beliefs* dapat diterima. *Science Knowledge* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.092$) terhadap *Evidence-based policy Practices* dengan nilai t-statistik $3.238 > 1.96$ dan nilai p-value $0.001 < 0.05$. Oleh karena itu, H6 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Science Knowledge* terhadap *Evidence-based policy Practices* dapat diterima.

Trust in scientific and scientist memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.078$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* dengan nilai t-statistik $2.703 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu, H7 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Trust in scientific and scientist* terhadap *Evidence-based policy beliefs* dapat diterima. *Trust in scientific and scientist* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.070$) terhadap *Evidence-based policy Practices* dengan nilai t-statistik $2.105 > 1.96$ dan nilai p-value $0.036 < 0.05$. Oleh karena itu, H8 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada *Trust in scientific and scientist* terhadap *Evidence-based policy Practices* dapat diterima.

Religious-science compatibility belief memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.207$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.494 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Religious-science compatibility belief* terhadap *Evidence-based policy beliefs*. *Religious-science compatibility belief* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.201$) terhadap *Evidence-based policy Practices* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.309 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Religious-science compatibility belief* terhadap *Evidence-based policy Practices*.

Science Knowledge memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.216$) terhadap *Evidence-based policy Practices* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.333 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Science Knowledge* terhadap *Evidence-based policy Practices*. *Science Knowledge* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.201$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.323 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Science Knowledge* terhadap *Evidence-based policy beliefs*.

Trust in scientific institution memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.202$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.381 > 1.96$ dan nilai p-value $0.001 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Trust in scientific institution* terhadap *Evidence-based policy beliefs*. *Trust in scientific institution* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.217$) terhadap *Evidence-based policy Practices* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.665 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Trust in scientific institution* terhadap *Evidence-based policy Practices*. *Trust in scientific and scientist* memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.239$) terhadap *Evidence-based policy beliefs* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik $3.084 > 1.96$ dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Trust in scientific and scientist* terhadap *Evidence-based policy beliefs*.

Trust in scientific and scientist memiliki pengaruh positif yang signifikan ($O = 0.244$) terhadap *Evidence-based policy Practices* yang dimoderatori oleh *Public service motivation* dengan nilai t-statistik

3.656>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05 sehingga membuktikan bahwa *public service motivation* memoderasi hubungan antar *Trust in scientific and scientist* terhadap *Evidence-based policy Practices*.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

Jenis Luaran	Identitas	Status Ketercapaian	Target
Luaran Wajib: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi -	Nama Jurnal: Heliyon Quartile: Q1 Publisher: Elsevier	With Editor	Accepted
Luaran Tambahan: Buku Ajar Ber ISBN	Unsri Press	Review	Accepted

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

Penelitian ini tidak melibatkan mitra

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Beberapa kendala dalam penelitian ini adalah pertama, pengurusan ethical clearance (Izin Komite Etika Penelitian FK Unsri) membutuhkan waktu yang lama. Pada 1 September 2022 surat dari Komite Etika Penelitian sudah terbit.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

1. Melakukan revisi dari artikel jurnal yang telah dikirimkan
2. Melakukan perbaikan dari hasil penulisan buku

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] S. Ettelt *et al.*, "Evidence-based policy? The use of mobile phones in hospital," *Journal of Public Health*, vol. 28, no. 4, pp. 299–303, 2006, doi: 10.1093/pubmed/fdl067.
- [2] A.-J. Gielen and A. Dijkman, "Evidence-based informed policy design for support groups for families of foreign fighters: Ex ante application of realistic evaluation and review," *Journal for Deradicalization*, no. 20, pp. 232–271, 2019.
- [3] T. C. Agampodi, S. B. Agampodi, N. Glozier, and S. Siribaddana, "Measurement of social capital in relation to health in low and middle income countries (LMIC): A systematic review," *Social Science and Medicine*, vol. 128, pp. 95–104, 2015, doi: 10.1016/j.socscimed.2015.01.005.
- [4] N. Mouter, J. I. Hernandez, and A. V Itten, "Public participation in crisis policymaking. How 30, 000 Dutch citizens advised their government on relaxing COVID-19 lockdown measures," *PLoS One*, vol. 16, no. 5 May, 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0250614.
- [5] A. R. M. Schellong, "Government 2.0: An exploratory study of social networking services in Japanese local government," *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 2, no. 4, pp. 225–242, 2008, doi: 10.1108/17506160810917936.
- [6] D. C. Benton, M. J. Watkins, C. J. Beasley, S. L. Ferguson, and A. Holloway, "Evidence-based policy: nursing now and the importance of research synthesis," *International Nursing Review*, vol. 67, no. 1, pp. 52–60, 2020, doi: 10.1111/inr.12572.
- [7] M. E. C. Silva, M.-A. M. Zarsuelo, Z. D. Zordilla, L. R. Estacio Jr., M. A. F. Mendoza, and C. D. Padilla, "Policy analysis on the mental health needs of overseas Filipino workers: Addressing gaps through evidence-based policy reform," *Acta Medica Philippina*, vol. 54, no. 6, pp. 769–779, 2020, doi: 10.47895/AMP.V54I6.2602.
- [8] S. Mishra, "Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on 'underrepresented' students," *Educ Res Rev*, vol. 29, 2020, doi: 10.1016/j.edurev.2019.100307.
- [9] P. Buykx, J. Humphreys, J. Wakerman, and D. Pashen, "Systematic review of effective retention incentives for health workers in rural and remote areas: Towards evidence-based policy," *Australian Journal of Rural Health*, vol. 18, no. 3, pp. 102–109, 2010, doi: 10.1111/j.1440-1584.2010.01139.x.
- [10] C. Hudson, "Basic skills provision for offenders on probation supervision: Beyond a rhetoric of evidence-based policy?," *British Journal of Educational Studies*, vol. 51, no. 1, pp. 64–81, 2003, doi: 10.1111/1467-8527.t01-2-00225.
- [11] G. Fontaine *et al.*, "Communicating science in the digital and social media ecosystem: Scoping review and typology of strategies used by health scientists," *Journal of Medical Internet Research*, vol. 21, no. 9, 2019, doi: 10.2196/14447.

- [12] E. Klemenčič and P. V. Mirazchiyski, "League tables in educational evidence-based policy-making: can we stop the horse race, please?," *Comparative Education*, vol. 54, no. 3, pp. 309–324, 2018, doi: 10.1080/03050068.2017.1383082.
- [13] I. Hardill and S. Mills, "Enlivening evidence-based policy through embodiment and emotions," in *Knowledge Mobilisation and the Social Sciences: Research Impact and Engagement*, Department of Social Sciences and Languages, Northumbria University, Lipman Building, Newcastle upon Tyne, United Kingdom: Taylor and Francis Inc., 2016, pp. 155–166.
- [14] L. Parker, "Including values in evidence-based policy making for breast screening: An empirically grounded tool to assist expert decision makers," *Health Policy (New York)*, vol. 121, no. 7, pp. 793–799, 2017, doi: 10.1016/j.healthpol.2017.03.002.
- [15] R. A. Gordon, H. L. Rowe, and K. Garcia, "Promoting Family Resilience Through Evidence-based Policy Making: Reconsidering the Link Between Adult-Infant Bedsharing and Infant Mortality," *Family Relations*, vol. 64, no. 1, pp. 134–152, 2015, doi: 10.1111/fare.12099.
- [16] C. Adam, Y. Steinebach, and C. Knill, "Neglected challenges to evidence-based policy-making: the problem of policy accumulation," *Policy Sciences*, vol. 51, no. 3, pp. 269–290, 2018, doi: 10.1007/s11077-018-9318-4.
- [17] C. Carceller, S. Dawson, and L. Lockyer, "Improving academic outcomes: Does participating in online discussion forums payoff?," *International Journal of Technology Enhanced Learning*, vol. 5, no. 2, pp. 117–132, 2013, doi: 10.1504/IJTEL.2013.059087.
- [18] L. Dicks, "Bees, lies and evidence-based policy," *Nature*, vol. 494, no. 7437, p. 283, 2013, doi: 10.1038/494283a.
- [19] M. C. Aldrich, B. Hidalgo, R. Widome, P. Briss, R. C. Brownson, and S. M. Teutsch, "The role of epidemiology in evidence-based policy making: A case study of tobacco use in youth," *Annals of Epidemiology*, vol. 25, no. 5, pp. 360–365, 2015, doi: 10.1016/j.annepidem.2014.03.005.
- [20] R. L. Anjum and S. D. Mumford, "A philosophical argument against evidence-based policy," *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, vol. 23, no. 5, pp. 1045–1050, 2017, doi: 10.1111/jep.12578.
- [21] Z. Rafique and S. L. Khoo, "Role of community-based organizations (CBOs) in promoting citizen participation: A survey study of local government institutions of Punjab, Pakistan," *International Journal of Sociology and Social Policy*, vol. 38, no. 3–4, pp. 242–258, 2018, doi: 10.1108/IJSSP-02-2017-0008.
- [22] E. A. Ruvalcaba-Gomez and C. Renteria, "Contrasting perceptions about transparency, citizen participation, and open government between civil society organization and government," *Information Polity*, vol. 25, no. 3, pp. 323–337, 2020, doi: 10.3233/IP-190185.
- [23] R. Cochrane, "Community visioning: the role of traditional and online public participation in local government," *Asia Pacific Journal of Public Administration*, vol. 37, no. 1, pp. 18–32, 2015, doi: 10.1080/23276665.2015.1018370.
- [24] E. MacKillop, S. Quarmby, and J. Downe, "Does knowledge brokering facilitate evidence-based policy? A review of existing knowledge and an agenda for future research," *Policy and Politics*, vol. 48, no. 2, 2020, doi: 10.1332/030557319X15740848311069.
- [25] R. D. French, "Is it time to give up on evidence-based policy? Four answers," *Policy and Politics*, vol. 47, no. 1, pp. 151–168, 2019, doi: 10.1332/030557318X15333033508220.
- [26] K. Oliver, T. Lorenc, and S. Innvær, "New directions in evidence-based policy research: A critical analysis of the literature," *Health Res Policy Syst*, vol. 12, no. 1, 2014, doi: 10.1186/1478-4505-12-34.
- [27] G. Yamey and J. Volmink, "An argument for evidence-based policy-making in global health," in *The Handbook of Global Health Policy*, Evidence to Policy initiative, Global Health Group at the University of California, San Francisco (UCSF), Epidemiology and Biostatistics in the

- UCSF School of Medicine, United States: wiley, 2014, pp. 133–155. doi: 10.1002/9781118509623.ch7.
- [28] B. Head, “Evidence-based policy : principles and requirements,” *Strengthening evidence-based policy in the Australian federation - Volume 1: Proceedings.*, no. May, pp. 13–26, 2010.
- [29] J. Word and H. Carpenter, “The new public service? Applying the public service motivation model to nonprofit employees,” *Public Personnel Management*, vol. 42, no. 3, pp. 315–336, 2013, doi: 10.1177/0091026013495773.
- [30] D. Behague, C. Tawiah, M. Rosato, T. Some, and J. Morrison, “Evidence-based policy-making: The implications of globally-applicable research for context-specific problem-solving in developing countries,” *Social Science and Medicine*, vol. 69, no. 10, pp. 1539–1546, 2009, doi: 10.1016/j.socscimed.2009.08.006.
- [31] R. Cookson, “Evidence-based policy making in health care: What it is and what it isn’t,” *Journal of Health Services Research and Policy*, vol. 10, no. 2, pp. 118–121, 2005, doi: 10.1258/1355819053559083.
- [32] K. K. Smith and T. Haux, “Evidence-based policy-making (EBPM),” in *Handbook of Social Policy Evaluation*, Global Public Health Unit, School of Social and Political Science, University of Edinburgh, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd., 2017, pp. 141–160. doi: 10.4337/9781785363245.
- [33] M. Sharpe, “Weighing the evidence: Prospects for evidence-based policy-making,” *Journal of Environmental Monitoring*, vol. 6, no. 10, pp. 114N–117N, 2004, doi: 10.1039/b414359k.
- [34] H. Pallett, “The new evidence-based policy: public participation between ‘hard evidence’ and democracy in practice,” *Evidence and Policy*, vol. 16, no. 2, pp. 209–227, 2020, doi: 10.1332/174426419X15704985880872.
- [35] B. W. Head, “Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges,” *Policy and Society*, vol. 29, no. 2. No longer published by Elsevier, pp. 77–94, May 01, 2010. doi: 10.1016/j.polsoc.2010.03.001.
- [36] I. Van De Goor *et al.*, “Determinants of evidence use in public health policy making : Results from a study across six EU countries,” vol. 121, pp. 273–281, 2017, doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.003.
- [37] M. Shahwan, S. Karamah, R. A. Mothana, and A. H. Khattab, “A Quantitative Evaluation of Evidence-Based Beliefs and Implementation Among Community Pharmacists : Findings and Impact from United Arab Emirates,” pp. 967–977, 2021.
- [38] J. L. Fua, I. S. Wekke, Z. Sabara, and R. U. Nurlila, “Development of Environmental Care Attitude of Students through Religion Education Approach in Indonesia,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2018, vol. 175, no. 1. doi: 10.1088/1755-1315/175/1/012229.
- [39] K. Rios and M. Aveyard, “Science-religion compatibility beliefs across Middle Eastern and American young adult samples: The role of cross-cultural exposure,” 2019, doi: 10.1177/0963662519869815.
- [40] C. P. Scheitle, D. R. Johnson, and E. H. Ecklund, “Scientists and religious leaders compete for cultural authority of science,” 2017, doi: 10.1177/0963662517718145.
- [41] S. Barmania and M. J. Reiss, “Health promotion perspectives on the COVID-19 pandemic: The importance of religion,” *Glob Health Promot*, vol. 28, no. 1, pp. 15–22, Mar. 2021, doi: 10.1177/1757975920972992.
- [42] A. Saltelli and M. Giampietro, “What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved?,” *Futures*, vol. 91, pp. 62–71, 2017, doi: 10.1016/j.futures.2016.11.012.

- [43] M. Djuric, J. Filipovic, and S. Komazec, “Reshaping the Future of Social Metrology: Utilizing Quality Indicators to Develop Complexity-Based Scientific Human and Social Capital Measurement Model,” *Soc Indic Res*, vol. 148, no. 2, pp. 535–567, 2020, doi: 10.1007/s11205-019-02217-6.
- [44] P. Achterberg, “A science confidence gap : Education , trust in scientific methods , and trust in scientific institutions in the United,” 2015, doi: 10.1177/0963662515617367.
- [45] E. Carabine, “Revitalising evidence-based policy for the Sendai Framework for disaster risk reduction 2015-2030: Lessons from existing international science partnerships,” *PLoS Currents*, vol. 7, no. DISASTERS, 2015, doi: 10.1371/currents.dis.aab45b2b4106307ae2168a485e03b8a.
- [46] S. Kim and J. Lee, “Citizen Participation, Process, and Transparency in Local Government: An Exploratory Study,” *Policy Studies Journal*, vol. 47, no. 4, pp. 1020–1041, 2019, doi: 10.1111/psj.12236.
- [47] C. Hanna, I. White, and B. Glavovic, “The uncertainty contagion: Revealing the interrelated, cascading uncertainties of managed retreat,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 12, no. 2, 2020, doi: 10.3390/su12020736.
- [48] S. Vanderslott, “Exploring the meaning of pro-vaccine activism across two countries,” *Soc Sci Med*, vol. 222, pp. 59–66, 2019, doi: 10.1016/j.socscimed.2018.12.033.
- [49] J. Howard and D. R. Reiss, *The anti-vaccine movement: A litany of fallacy and errors*. 2018.
- [50] J. Y. Lim, K.-K. Moon, and R. K. Christensen, “Does psychological empowerment condition the impact of public service motivation on perceived organizational performance? Evidence from the US federal government,” *International Review of Administrative Sciences*, 2021, doi: 10.1177/00208523211008958.
- [51] A. Lionardo, R. Kurniawan, K. C. Setiawan, C. Nasirin, and M. C. Basrun Umanailo, “Public service motivation on the state civil apparatus: Local government policies strategy in administration reform,” 2021, pp. 3510–3516.
- [52] L. E. Paarlberg and B. Lavigna, “Transformational leadership and public service motivation: Driving individual and organizational performance,” *Public Administration Review*, vol. 70, no. 5, pp. 710–718, 2010, doi: 10.1111/j.1540-6210.2010.02199.x.
- [53] G. A. Brewer, “Public service motivation and performance,” in *Public Management and Performance: Research Directions*, University of Georgia, School of Public and International Affairs, Georgian Institute of Public Administration, United States: Cambridge University Press, 2013, pp. 152–177. doi: 10.1017/CBO9780511760587.007.
- [54] W. Shi, “The study of administrative division reform in China on the basis of the E-government,” in *2014 International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Service, EEE 2014*, 2014, vol. 1, pp. 3–6.
- [55] J. Hair, G. T. M. Hult, C. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, vol. 46, no. 1–2. 2013. doi: 10.1016/j.lrp.2013.01.002.
- [56] A. H. Wonder, E. K. Martin, and K. Jackson, “Supporting and Empowering Direct-Care Nurses to Promote EBP: An Example of Evidence-Based Policy Development, Education, and Practice Change,” *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, vol. 14, no. 4, pp. 336–338, 2017, doi: 10.1111/wvn.12239.
- [57] L. Nadelson *et al.*, “I Just Don’t Trust Them: The Development and Validation of an Assessment Instrument to Measure Trust in Science and Scientists,” *Sch Sci Math*, vol. 114, no. 2, pp. 76–86, 2014, doi: 10.1111/ssm.12051.
- [58] S. Kim *et al.*, “Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing issues of measurement

- invariance,” *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 23, no. 1, pp. 79–102, 2013, doi: 10.1093/jopart/mus027.
- [59] D. H. Coursey, J. L. Perry, J. L. Brudney, and L. Littlepage, “Psychometric Verification of Perry’s Public Service Motivation Instrument: Results for Volunteer Exemplars,” *Review of Public Personnel Administration*, vol. 28, no. 1, pp. 79–90, 2008, doi: 10.1177/0734371X07309523.
- [60] H. Jogiyanto and W. Abdillah, *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2011.
- [61] I. Ghozali, *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- [62] Jogiyanto and W. Abdillah, *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*, 1st ed. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2019.

Lampiran 1. Bukti Submit dan In Review

← Submissions Being Processed for Author

Page: 1 of 1 (1 total submissions)

Results per page 10

Action	Manuscript Number	Title	Initial Date Submitted	Status Date	Current Status
View Submission Send E-mail	HELIYON-D-22-22604	What makes evidence-based policy beliefs and implementation of Indonesian government officials: The mediating role of religious-science compatibility beliefs	Sep 29, 2022	Nov 06, 2022	Under Review

Page: 1 of 1 (1 total submissions)

Results per page 10

Lampiran 2. Bukti Progress Buku



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT. PENERBIT DAN PERCETAKAN
Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar Palembang Telp/ fax. (0711) 360969
Email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENERBITAN

Nomor : 0793/UN9.5.10/LL/2022

Kepala UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya atau Unsri Press dengan ini menerangkan bahwa :

Judul Buku : Kebijakan Berbasis Bukti: Praktik di Sumatera Selatan
ISBN : 978 – xxx-xxx-xxx-x (Masih dalam proses pengajuan)
Penulis : Dr. Andries Lionardo, M.Si
Fasial Nomaini, S.Sos, M.Si
Anang Dwi Santoso, SAP, MPA
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom, M.Si

Yang akan diterbitkan di Unsri Press sampai saat ini naskah buku masih **dalam proses review.**

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 September 2022

Kepala,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

